LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD. BPR SARIMADU
TAHUN 2018

BANK SARIMADU

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Membangun Ekonomi Kerakyatan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
BANK PD. BPR SARIMADU
TAHUN 2018

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Seluruh petugas bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (*Transparancy*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (*Accountibility*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan bank.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifias serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (*GCG*)* yaitu: transparansi *(transparancy),* akuntabilitas *(accountability),* pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency),* dan kewajaran *(fairness).*

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) :

1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
6. SE OJK Nomor: 01/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risio Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan Tata Kelola (GCG*)* BPR setiap tahun.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) bank tahun 2018 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOVERNANCE COMMITMENT)*

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *Governance Commitment* pada PD. BPR Sarimadu.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOVERNANCE STRUCTURE)*

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi PD. BPR Sarimadu. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2018, PD. BPR Sarimadu telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu :

1) Pada tanggal 26 April 2018, bertempat di Kantor Pusat PD.BPR Sarimadu dengan agenda rapat “Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2017”. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

a) Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi PD.BPR Sarimadu tahun buku 2017, dengan ikhtisar sebagai berikut :

(1) Total Aset	Rp.147.800.215.957,
(2) Aset Produktif	Rp.141.128.084.733,
(3) Total Pendapatan	Rp. 27.476.724.292,
(4) Total Biaya	Rp. 32.122.998.407,
(5) Laba (Rugi) tahun berjalan 2017	Rp. (4.646.274.114),
(6) Laba (Rugi) Tahun Lalu	Rp. (6.772.184.169),
(7) Akum. Laba (Rugi) Th buku 2017	Rp. (11.418.458.283),-

b) Menyetujui dan mengesahkan Biaya Tenega Kerja Tahun 2017 sebesar Rp.15.080.827.210,- *(lima belas milyar delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah)* dengan persentase sebesar 56.14% dari realisasi pendapatan tahun 2016 atau sebesar 44.84% dari realisasi biaya tahun 2016 yang terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR Sarimadu;

b. Direksi segera memperbaharui Rencana Strategi bank periode tahun 2018-2023 dan mempersiapkan perubahan usaha bank dari sistem konvensional menjadi sistem syariah;

c. Menyetujui penghapusbukuan inventaris yang memiliki nilai buku Rp.1,- (satu rupiah) atau tidak dapat digunakan lagi.

2) Pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di Kantor PD. BPR Sarimadu, dengan agenda rapat dan Keputusan penting yang dihasilkan sebagai berikut :

a) Pengangkatan Direktur Operasional an. Sdr. Yordan, sebagai tindak lanjut hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Direksi dari OJK Pekanbaru dan Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemasaran PD. BPR Sarimadu an. Sdr. Ishardi Yusri.

b) Rekrutmen Calon Direksi yang kosong.

3) Pada tanggal 15 November 2018 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kampar. Dengan Agenda Rapat dan Keputusan penting yang dihasilkan sebagai berikut:

a) Komposisi pengurus PD. BPR Sarimadu;

b) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

c) Mengesahkan Pemberian Tunjangan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direksi dari Bulan Januari s.d Juni 2018;

d) Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;
e) Penunjukan Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;
f) Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Sarimadu;
g) Persetujuan Lelang Inventaris dan Kendaraan yang nilai buku Rp.1,- / kondisi rusak melalui kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
h) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) melalui PD. BPR Sarimadu;
i) Dana Penunjang Operasional Kepada Direksi sebesar maksimal 1 bulan gaji pokok Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;
j) Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PD. BPR Sarimadu.

b. Dewan Pengawas

1) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Sampai dengan akhir Tahun 2018 Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Sarimadu tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

a) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha bank;
b) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis tahunan dan kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR;
c) Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi;

d) Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PD. BPR Sarimadu dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

3) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
01	22 Januari 2018	Tunjangan Jabatan Plt. Direksi	a. Ketua Dewan Pengawas/ Plt. Direksi b. Anggota Dewan Pengawas/ Plt. Direksi
02	12 Juli 2018	Evaluasi Operasional PD. BPR Sarimadu Semester I (Januari s.d Juni 2018.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Plt. Direktur Pemasaran e. Pjs. Kepala SKAI f. Auditor
03	23 Juli 2018	Pembahasan terhadap Inventaris yang dihapusbuku Tahun 2018.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Kepala Bagian Umum e. Pjs. Kepala SKAI f. Kepala Seksi Umum & Personalia g. Kepala Seksi Operasional h. Sekretaris

04	24 Agustus 2018	Evaluasi Kinerja Operasional PD. BPR Sarimadu bulan Juli 2018.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Plt. Direktur Pemasaran e. Pjs. Kabag. SKAI
05	20 September 2018	Evaluasi Kinerja Operasional PD. BPR Sarimadu bulan Agustus 2018	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Plt. Direktur Pemasaran e. Pjs. Kepala SKAI
06	22 Oktober 2018	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu Triwulan III (September) 2018	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Pjs. Kepala SKAI

c. Direksi

1) Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada akhir Tahun 2018 Direksi PD. BPR Sarimadu terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Operasional dan sekalian ditunjuk/ditetapkan melalui RUPS-LB sebagai Pjs. Direktur Utama, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
YORDAN	Pjs. Direktur Utama	15 November 2018	-	s.d diangkat Direktur Utama yang Depenitif
YORDAN	Direktur Operasional	08 Juni 2018	05 Juli 2018	08 Juni 2022

Pengangkatan Direksi Berdasarkan:

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 07 Juni 2018 dan Keputusan Bupati Kampar Selaku Pemilk PD. BPR Sarimadu Nomor: 539-367/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PD. BPR Sarimadu An. Yordan, S.E., Ak., CA.
2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 Nopember 2018 mengenai penetapan Sdr. Yordan Direktur Operasional menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PD. BPR Sarimadu menjelang ditetapkannya Direktur Utama yang Defenitif.

Integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha bank, namun jumlah dan komposisi belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Anggota Direksi berjumlah 1 (satu) orang.
2. Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, tetapi *fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas.
5. Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Pengawas.
6. Tidak ada Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Sebagian rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Anggota Direksi.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selama tahun 2018.hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

a) Pembuatan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 pada bulan Desember 2018 dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.

b) Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan bank, meliputi:
   (1) Perubahan atas Pedoman Perkreditan mengenai Kredit Konsumtif Sarimadu, Kredit Bakulan dan Prosedur Persetujuan Penyimpangan Pedoman Perkreditan;
   (2) Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Cleaning Service.
   (3) Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknologi Informasi (TI);
   (4) Pembuatan Ketentuan Pelaksanaan Tabungan Qurban Sarimadu.
   (5) Perubahan atas Ketentuan Cuti dan Bekal Cuti bagi Pegawai Kontrak;
   (6) Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Operasional;
   (7) Perubahan atas Peraturan Kepegawaian mengenai uang pisah;
   (8) Pembuatan Ketentuan Pelaksanaan Kredit Pembelian Barang Elektronik.
   (9) Pembuatan Ketentuan Pelaksanaan Tabungan Berhadiah Sarimadu.
   (10) Pembuatan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan Pengawas;
   (11) Pembuatan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi;
   (12) Pembuatan Pedoman Kerja, Sitem dan Prosedur Kepatuhan;
   (13) Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
   (14) Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Pengambil Alihan Agunan (AYDA);

(15) Perubahan atas Ketentuan Batas Nominal Transaksi dan Otorisasi Pada Aplikasi CBS Bank;

c) Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian *(prudential banking).*
d) Melakukan review terhadap suku bunga kredit.

3) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
01	04 Januari 2018	Sistem Aplikasi dan Hak Akses Pegawai	a. Plt. Direksi b. Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala SKAI d. Seksi IT
02	10 Januari 2018	Pembahasan Penyempurnaan Aplikasi Bank	a. Plt. Direksi b. Seluruh Kepala Bagian c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Kepala Seksi IT
03	12 Januari 2018	Pembahasan Kantor Kas Tenayan Raya	a. Plt. Direksi b. Seluruh Kepala Bagian c. Pimpinan Cabang Pekanbaru
04	16 Januari 2018	Diskusi bersama Vendor Aplikasi PT. Gurindam Fajar Sinergi (GFS)	a. Plt. Direksi b. Seluruh Kepala Bagian c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Seksi IT e. Vendor
05	23 Januari 2018	Pembahasan Migrasi Data dan Upgrade Aplikasi, Harga dan Biaya, Waktu dan Tekhnis Pelaksanaan	a. Plt. Direksi b. Kepala Bagian Umum c. Vendor
06	24 Januari 2018	1. Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa	a. Plt. Direksi b. Seluruh Kepala Bagian c. Seluruh Pimpinan

		Keuangan (OJK) 2. Pembahasan Undian Berhadiah 3. Evaluasi Inventaris	Cabang d. Kepala Seksi IT
07	24 Januari 2018	Mutasi Pegawai	a. Plt. Direksi b. Kepala SKAI
08	01 Februari 2018	Pembentukan Fungsi/unit dan Pelaksanaan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan	a. Plt. Direksi b. Kepala Bagian Perencanaan
09	07 Februari 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Flamboyan	a. Plt. Direksi b. Pimpinan Cabang Flamboyan c. Kepala SKAI d. Auditor e. Kepala Seksi Lending Flamboyan & Sukaramai
10	08 Februari 2018	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Pusat Bangkinang san Kantor Kas Tambang	a. Plt. Direksi b. Kepala Bagian Bisnis c. Kepala SKAI d. Auditor e. Kepala Bagian Bisnis f. Kepala Seksi Kas Pusat g. Kepala Seksi Funding Pusat h. Kepala Seksi Adm Kredit i. Kepala Seksi Remedial j. Kepala Seksi TSI k. Kepala Seksi Operasional Pusat l. Kepala Kantor Kas Tambang m. Kepala Seksi Lending Pusat &Tambang
11	08 Februari 2018	Pembahasan Perubahan Ketentuan Kredit Bakulan	a. Plt. Direksi b. Kepala SKAI c. Kepala Bagian Bisnis d. Kepala Bagian Perencanaan

12	08 Februari 2018	Tindak Lanjut LHP SKAI Terhadap Sdr. Rizky Pratiwi	a. Plt. Direksi
13	09 Februari 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Ujungbatu	a. Plt. Direksi b. Pimpinan Cabang Ujungbatu c. Kepala SKAI d. Auditor e. Kasi Operasional Ujungbatu f. Pjs. Kepala Seksi Lending Ujungbatu
14	12 Februari 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Lipatkain	a. Plt. Direksi b. Pimpinan Cabang Lipatkain c. Kepala SKAI d. Auditor
15	13 Februari 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Pekanbaru	a. Plt. Direksi b. Pimpinan Cabang Pekanbaru c. Kepala SKAI d. Auditor e. Kasi Lending Pekanbaru f. Kasi Operasional Pekanbaru
16	14 Februari 2018	1. Promosi dan Mutasi Pegawai 2. Peningkatan Status Jabatan Pegawai	a. Plt. Direksi
17	05 Maret 2018	Mutasi Pegawai	a. Plt. Direksi

18	07 Maret 2018	1. Pembentukan Tim Kredit Bakulan 2. Pembahasan Saran-saran dari Pegawai kepada Manajemen 3. Evaluasi Realisasi Target Kredit 4. Penyempurnaan Ketentuan Cash In Safe Brankas & Cash In Box Kasir Maing-masing Kantor 5. Persiapan Acara Ulang Tahun PD. BPR Sarimadu Tahun 2018	a. Plt. Direksi b. Seluruh Kepala Bagian c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Kasi Kepatuhan, MR & APU-PPT e. Kasi Perencanaan
19	13 Maret 2018	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Kas Dalu-dalu	a. Plt. Direksi b. Pjs. Kepala SKAI c. Pimpinan Cabang Ujungbatu d. Auditor e. Kepala Kantor Kas Dalu-dalu
20	14 Maret 2018	Pembahasan Usulan Hapus Buku Kredit Tahun 2018 pada Masing-masing Kantor Cabang/ Bagian Bisnis	a. Plt. Direksi b. Kepala Bagian Bisnis c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Kepala Seksi Remedial e. Pl. Remedial
21	27 Maret 2018	Promosi & Mutasi Pegawai pada Organisasi	a. Plt. Direksi

22	03 April 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Kas Pasirpangaraian	a. Plt. Direksi b. Pimpinan Cabang ujungbatu c. Pjs. Kepala SKAI d. Auditor e. Kepala Kantor Kas Pasirpangaraian
23	24 April 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Kas Kotalama	a. Plt. Direksi b. Pimpinan Cabang Ujungbatu c. Pjs. Kepala SKAI d. Auditor e. Kepala Kantor Kas Kotalama
24	07 Mei 2018	1. Evaluasi Karyawan Kontrak 2. Pembahasan Tim Marketing 3. Evaluasi Kinerja	a. Plt. Direktur Operasional b. Seluruh Kepala Bagian c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Kepala Seksi Umum & Personalia
25	22 Mei 2018	1. Pembahasan THR 2. Laporan Realisasi Target Masing-masing Kantor	a. Plt. Direktur Pemasaran b. Plt. Direktur Operasional c. Seluruh Kepala Bagian d. Seluruh Pimpinan Cabang
26	24 Mei 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Kas Kabun	a. Plt. Direktur Pemasaran b. Plt. Direktur Operasional c. Pjs. Kepala SKAI d. Auditor e. Kepala Kantor Kas Kabun
27	21 Juni 2018	Permasalahan Kursial & Program Kerja PD. BPR Sarimadu	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Seluruh Kepala Bagian d. Kepala Seksi Operasional e. Kepala Seksi Kepatuhan, MR & APU-PPT

28	25 Juni 2018	Evaluasi Target s.d Smt I 2018 & Terobosan kedepannya	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Seluruh Kepala Bagian d. Seluruh Kepala Bagian e. Kepala Seksi Funding Lipatkain
29	12 Juli 2018	Mutasi dan Promosi Pegawai	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran/Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Bisnis/Remedial e. Pimpinan Cabang Flamboyan
30	26 Juli 2018	1. Realisasi Laba/Rugi Masing-masing Cabang dan Bagian Bisnis Kantor Pusat Smt I Tahun 2018 dan Program Kerja serta Peningkatan Kinerja PD. BPR Sarimadu pada Smt II Tahun 2018 2. Rencana Kerjasama Mesin EDC dengan Bank Permata Syariah	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran/Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala Bagian Bisnis d. Kepala Bagian Umum e. Seluruh Pimpinan Cabang f. Pjs. Kepala SKAI g. TSI
31	03 Agustus 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Lending/Kredit Bagian Bisnis Kantor Pusat Bangkinang	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Plt. Direktur Pemasaran e. Kepala Bagian Bisnis f. Pjs. Kepala SKAI g. Auditor h. Kepala Seksi lending

			i. Kepala Seksi Remedial j. Kepala Seksi Adm
32	03 Agustus 2018	1. Rekrutmen Satpam Pada Kantor Cabang Ujungbatu 2. Rotasi dan Mutasi Pegawai PD. BPR Sarimadu	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Kepala Bagian Umum d. Pimpinan Cabang Ujungbatu
33	10 Agustus 2018	Penetapan Sanksi Pelanggaran Peraturan Kepegawaian	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Pjs. Kepala SKAI
34	14 Agustus 2018	Permasalahan Kepegawaian PD. BPR Sarimadu	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran/Kepala Perencanaan c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Bisnis/Remedial e. Pimpinan Cabang Ujungbatu
35	03 September 2018	1. Target Laba Rugi Kantor Pusat dan Masing-masing Kantor Cabang s.d Desember 2018 2. Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 06/KPTS/I/2018 mengenai penyesuaian Tunjangan Pegawai	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran/Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Bisnis/Remedial e. Seluruh Pimpinan Cabang f. Pjs. Kepala SKAI
36	06 September 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Flamboyan	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional

			d. Plt.Direktur Pemasaran e. Pimpinan Cabang Flamboyan f. Pjs. Kepala SKAI g. Pjs. Kepala Seksi Lending Cab. Flamboyan h. Auditor
37	13 September 2018	Pembahasan Kredit & Penyelesaian Kredit Bermasalah	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran/Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala Bagian Bisnis d. Kepala Seksi Lending wilayah Kuok & Tambang e. Kepala Seksi Lending Kantor Pusat f. Kepala Seksi Remedila Kantor Pusat g. Pelaksana Bisnis
38	19 September 2018	Pembahasan Kerjasama dengan Pengacara dan Konsultan Hukum Refi Yulianto, SH & Partners	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Bisnis/Remedial e. Pjs. Kepala SKAI f. Kepala Seksi Perencanaan
39	26 September 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Lipatkain	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Operasional d. Plt. Direktur Pemasaran e. Pimpinan Cabang Lipatkain f. Pjs. Kepala SKAI g. Auditor h. Kepala Seksi Lending Lipatkain i. Kepala Seksi Operasional
40	03 Oktober 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas

		Cabang Pekanbaru	c. Direktur Operasional d. Plt. Direktur Pemasaran e. Pimpinan Cabang Pekanbaru f. Pjs. Kepala SKAI g. Auditor h. Kepala Seksi Operasional
41	4 Oktober 2018	Evaluasi Kredit	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran/Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala Bagian Bisnis/Remedial d. Seluruh Pimpinan Cabang e. Seluruh Kepala Seksi Lending f. Seluruh Kepala Seksi Remedial
42	10 Oktober 2018	Pembahasan Debitur yang akan diserahkan ke Lawyer	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Kepala Bagian Bisnis/Remedial d. Kepala Seksi Lending Kuok/Tambang e. Kepala Seksi Lending Kantor Pusat f. Kepala Seksi Remedial
43	29 Oktober 2018	1. Pemotongan Kewajiban Bunga dan Denda Kantor Cabang Ujungbatu 2. Kerjasama dengan PT. EMA dan PT. SAI 3. Penutupan Kantor Kas	a. Direktur Operasional b. Plt. Direktur Pemasaran c. Pimpinan Cabang Ujungbatu
44	16 November 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Kas Kuok dan Kantor Kas Tambang	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala Bagian Bisnis d. Pjs. Kepala SKAI e. Auditor f. Kepala Kantor Kas Kuok

			g. Kepala Kantor Kas Tambang
45	19 November 2018	Mutasi Pegawai PD. BPR Sarimadu	a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Perencanaan c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Bisnis e. Pjs. Kepala SKAI
46	29 November 2018	Dana Tunjangan Operasional Direksi PD. BPR Sarimadu	a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Perencanaan c. Plt. Kepala Bagian Umum d. Kepala Seksi Kepatuhan, MR & APU PPT e. Kepala Seksi Perencanaan
47	05 Desember 2018	Mutasi Pegawai dan Evaluasi Karyawan Kontrak	a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Perencanaan c. Plt. Kepala Bagian Umum
48	14 Desember 2018	1. Panggilan Terkait Absensi Pegawai An. Safrizal Ependi 2. Pembiayaan Pesangon Pegawai An. Zahedi 3. Pensiun Dini Pegawai An. Nurfajri	a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Perencanaan c. Pjs. Kepala SKAI d. Plt. Kepala Bagian Umum
49	17 Desember 2018	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Kas Sukaramai	a. Direktur Operasional b. Pimpinan Cabang Flamboyan c. Pjs. Kepala SKAI d. Auditor e. Kepala Kantor Kas Sukaramai
50	28 Desember 2018	1. Sosialisasi SOTK Baru. 2. Rencana Fit and Proper Test	a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Umum c. Pjs. Kepala SKAI d. Plt. Kepala Bagian Bisnis

		Pejabat Eksekutif. 3. Persiapan Tutup Buku Akhir Tahun 2018.	e. Plt, Kepala Bagian Kepatuhan, MR & APU PPT f. Kepala Seksi Umum & Personalia g. Kepala Seksi Pembukuan & Pelaporan

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti BPR Sarimadu dibawah Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

a. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1) Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD. BPR Sarimadu dan perusahaan lainnya.
2) Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

b. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

1) Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR Sarimadu dan perusahaan lainnya.
2) Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

c. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

1) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk uang)	s.d Nov 2018 berjumlah 2 (dua) orang dan s.d akhir Des 2018 berjumlah 1 (satu) orang	364,3	1	252
Fasilitas lain tidak dalam bentuk uang (perumahan, transportasi/Kendaraan)	1 (satu) unit mobil untuk ketua Dewan Pengawas		1 (satu) unit mobil untuk Direktur Operasional	

2) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp 25 juta	-	-
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	-	-
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	-	-
Diatas Rp 100 juta	1	1

3) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR Sarimadu pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	11,5	11,5	100 : 100
Direksi	22,7	22,7	100 : 100
Pegawai	10,1	2,4	81 : 19
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi			66 : 34
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			69 : 31

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PD. BPR Sarimadu belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan:

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

a. Fungsi Kepatuhan

PD. BPR Sarimadu telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tetapi belum ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1) Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi bank.
2) Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
3) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
5) Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

7) Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pengkajian Rancangan Kebijakan** :
   Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional yaitu 7 (tujuh) ketentuan internal, 3 (tiga) Kebijakan Operasional/SOP, 4 (empat) Pedoman dan 1 (satu) Struktur Organisasi.
2. **Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan**
   Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telah disesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect)*.

   Indirect **sosialisasi** dilakukan dengan cara menyampaikan kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internal yang diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*.

   Direct **Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
   a. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum untuk melakukan pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan. Pada tahun 2018 telah dilakukan pelatihan yang diikuti oleh Bagian Kepatuhan dan SKAI dengan materi training adalah Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.
   b. Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan internal bank yang baru diterbitkan kepada seluruh karyawan bank.

3. **Pemantauan Pemenuhan Komitmen**
   Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 telah terpenuhi.

b. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
2) Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3) Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, SKAI telah berupaya melaksanakan amanah yang diberikan.

Pencapaian Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, yaitu dengan:

1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
2. Melakukan audit terhadap fraud yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari *auditee*. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

Rencana Kerja Audit Tahun 2019

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
2. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PD. BPR Sarimadu kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasarkan analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program dibidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD. BPR Sarimadu telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

1) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun buku berturut-turut.
3) Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, bank akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

1) Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko.
3) Penyusunan Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko sebagai berikut:
    a) Penyusunan Laporan Profil Risiko.
    b) Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
    c) Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
    d) Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
    e) Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

b. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada bank. Untuk itu bank telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

7. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait posisi Desember 2018.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	6	1.056,6

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Arman	Ketua Dewan Pengawas	0
2	Yordan	Pjs. Direktur Utama/ Direktur Operasional	67,1

Selama tahun 2018 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

8. RENCANA BISNIS BANK

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2019, bank melakukan penyusunan Rencana Bisnis tahun 2019 mengacu kepada POJK Nomor: 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut :

a. RENCANA DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

1) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
   a) Penyusunan *Key Performance Indikator*(KPI) Pegawai;
   b) Merencanakan/mengaktifkan payment point dan kas keliling untuk memperluas pelayanan bank;
   c) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kampar;
   d) Pemisahan tabungan untuk transaksi kredit dan tabungan untuk simpanan (non kredit);
   e) Penutupan Jaringan Kantor Kas;
   f) Bekerjasama dengan vendor IT dalam rangka penarikan tunai tanpa kartu;

g) Pemenuhan kepengurusan yaitu penambahan Dewan Pengawas dan Direktur Utama;
h) Melakukan efisiensi biaya untuk meningkatkan laba terutama dalam hal penutupan jaringan kantor dan evaluasi sewa kantor;
i) Melakukan lelang inventaris dan kendaraan yang sudah dihapusbukukan;
j) Penyaluran kredit pembelian barang mebel atau furnitur.

2) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
   a) Perubahan badan hukum dari Perusahan Daerah (PD) menjadi Perumda atau Perseroda sesuai Permendagri Nomor 94 tahun 2017;
   b) Penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kampar;
   c) Perubahan Peraturan Kepegawaian Nomor 45;
   d) Penyesuaian bobot kerja berdasarkan pangkat dan gaji.

3) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
   a) Penambahan Modal disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
   b) Pengajuan perubahan bentuk usaha bank dari konvensional menjadi syariah;
   c) Perubahan Visi dan Misi bank;
   d) Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010.

b. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2019

1)	Anggaran Total Aset	Rp	164.879.327,-ribu
2)	Anggaran Aset Produktif	Rp	161.281.679,-ribu
3)	Anggaran Pendapatan Operasional	Rp	33.160.431,-ribu
4)	Anggaran Biaya Operasional	Rp	28.582.916,-ribu
5)	Anggaran Pendapatan Non Opersaional	Rp	606.418,-ribu
6)	Anggaran Biaya Non Operasional	Rp	100.239,-ribu
7)	Anggaran Laba	Rp	5.083.694,-ribu
8)	Anggaran Pengadaan dan Investasi	Rp	600.000,-ribu

c. RASIO-RASIO KEUANGAN TAHUN 2019

1)	Rasio KPMM	27.55%
2)	Rasio Modal Inti	27.07%
3)	Rasio KAP	5.52%
4)	Rasio PPAP	100.00%
5)	Rasio NPL	
	a. Gross	9.95%
	b. Netto	5.73%
6)	Rasio Kredit terhadap total aset produktif	80.74%

7) Rasio Return On Assets 3.19%
8) Rasio Net Interest Margin 12.25%
9) Rasio BOPO 86.20%
10) Cash Ratio 12.89%
11) Loan to Deposit Ratio (LDR) 81.66%

d. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

1) Target jangka pendek
   a) NPL Gross dibawah 9.95%.
   b) Penghimpunan dana tabungan meningkat sebesar 10%.
   c) Penyaluran dana meningkat 10.02%.
   d) BOPO ditargetkan menjadi sebesar 86.20%.

2) Target jangka menengah
   a) Pembuatan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan perbankan.
   b) Perubahan Anggaran Dasar.
   c) Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

e. ARAH KEBIJAKAN BANK

1) Penghimpunan dana diarahkan pada tabungan simpel dan pengelolaan dana-dana pemerintahan daerah yang akan disalurkan kepada pegawai dan atau masyarakat.
2) Penyaluran dana akan dimaksimalkan pada kredit konsumtif melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara komprehensif sesuai dengan operasional bank.
4) Persiapan perubahan Peraturan Daerah (PERDA) menyesuaikan dengan Permendagri dan persiapan perubahan bentuk usaha dari konvensional menjadi syariah.

f. KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BANK

1) Mengatur dan menetapkan formulir analisa kedit dan taksasi jaminan.
2) Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengukur kinerja pegawai secara kuantitatif dari pada kualitatif .
3) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola bank dan Manajemen Risiko.
4) Memenuhi kekosongan struktur organisasi bank.

g. ANALISIS POSISI BANK DALAM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN ASET DAN/ATAU LOKASI

1) Berdasarkan lokasi bank masih mampu bersaing dengan bank-bank lain dimana lokasi kantor bank berada pada daerah potensial.
2) Bank memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspansi usaha berdasarkan aset yang dimiliki saat ini.
3) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak adalah sumber daya untuk meningkatkan ekspansi usaha dengan meningkatkan kompetensi, motivasi dan integritas pegawai.

h. STRATEGI PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS USAHA

1) Sektor ekonomi di wilayah bank khususnya sektor agribisnis mengalami penurunan sehubungan dengan hal tersebut penyaluran kredit akan diarahkan pada sektor konsumtif.
2) Mengarahkan kredit ke sektor usaha yang memiliki perputaran usaha yang tinggi sehingga jangka waktu pengembalian kredit menjadi cepat.
3) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan badan usaha untuk penyaluran kredit perorangan maupun lembaganya.

i. STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

1) Meningkatkan upaya promosi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga, badan usaha serta nasabah.
2) Meningkatkan upaya penghimpunan dana tabungan dengan program undian tabungan berhadiah.

j. RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pada tahun 2019 bank akan melakukan perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

k. RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1) Rencana Pengembangan Teknologi Informasi
   Bank akan melakukan pengembangan sistem teknologi informasi untuk kebutuhan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Rencana Pengadaan Teknologi Informasi
   Pada tahun 2019 bank tidak merencanakan Pengadaan Teknologi Informasi.

l. RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) Pada tahun 2019 bank merencanakan rekrut pegawai kontrak untuk ditempatkan sebagai security/Satpam di Cabang Ujungbatu yang tergabung dalam Struktur Organisasi Bank berjumlah 7 (tujuh) orang.
2) Rencana biaya pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.329.588,-ribu.

m. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BARU YANG WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK

1) Rekening Kas Daerah (RKD) & Alokasi Dana Desa (ADD).
   Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan penampungan seluruh penerimaan dana Desa dan pembiayaan seluruh pengeluaran dana Desa. (waktu pelaksanaan pada semester I).
2) Layanan Keuangan Digital (LKD)
   Meningkatkan layanan kepada nasabah /masyarakat untuk kemudahan bertransaksi, praktis dan aman dengan registrasi atau upgrade layanan uang elektronik server based dan setor tunai / isi ulang /top up uang elektronik server based serta tarik uang elektronik server based. (waktu pelaksanaan pada semester II).
3) Penarikan Tunai Tanpa Kartu.
   Meningkatkan pelayanan kepada nasabah/masyarakat dalam penarikan dana tunai melalui mesin ATM tanpa kartu yang bekerjasama dengan bank umum.
4) Kas Keliling
   Melayani nasabah di wilayah eks kantor kas bank yang ditutup untuk menerima setoran tabungan dan kredit serta penarikan tabungan nasabah. (waktu pelaksanaan pada semester I dan II).

n. RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kas keliling pada :
   a) Tenayan Raya di Kec. Tenayan Raya
   b) Kabun di Kec. Kabun
   c) Kuok di Kec. Kuok

2) Penutupan Kantor Kas :
   a) Kas Tenayan raya di Kec. Tenayan Raya
   b) Kas Kabun di Kec. Kabun
   c) Kas Kuok di Kec. Kuok

o. INFORMASI LAINNYA

1) Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah:
   1) Melakukan komunikasi dan penagihan secara intensif kepada debitur macet, sehingga didapatkan solusi agar kredit dapat diselesaikan;

2) Melanjutkan upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum dengan jalan somasi, eksekusi serta penjualan agunan kredit dengan bekerjasama dengan lawyer bank;
3) Melakukan upaya penjualan agunan untuk mengurangi kredit bermasalah.

2) Penyelesaian Agunan Yang Diambilalih (AYDA) dan Penagihan Kredit Hapus buku:
   a) Melakukan pelelangan dan penjualan Agunan Yang Diambil Alih untuk mengembalikan kerugian bank menjadi pendapatan;
   b) Tetap berupaya untuk melakukan penagihan secara maksimal terhadap kredit yang telah di Hapus Buku, agar secara maksimal dapat kembali menjadi pendapatan bank.
3) Rencana Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Konsumen dan/ atau Masyarakat.
4) Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan.

9. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan media *promotion* lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* bank terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.

10. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN *(INTERNAL FRAUD)* YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2018 ditemukan adanya beberapa penyimpangan intern (*internal fraud*), yaitu :

a. Pada Kantor Cabang Flamboyan
   Berdasarkan pemeriksaan khusus SKAI tanggal 25 Januari s.d 26 Januari 2018 pada kantor cabang Flamboyan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 telah dilakukan Penarikan tabungan nasabah fiktif (tanpa sepengetahuan nasabah) yang dilakukan oleh kasir/ pegawai kontrak kantor cabang Flamboyan PD. BPR Sarimadu.
b. Pada Kantor Cabang Pekanbaru
   Berdasarkan pemeriksaan khusus SKAI tanggal 12 s.d 17 September 2018 bahwa telah dilakukan penarikan tabungan nasabah tanpa disertai dengan surat kuasa penarikan tabungan dari nasabah yang mengakibatkan nasabah komplain ke bank yang dilakukan oleh petugas funding kantor cabang Pekanbaru

Bank telah melakukan upaya penyelesaian terhadap penyimpangan interen (internal fraud), yaitu :

a. Pada Kantor Cabang Flamboyan
   1) Melakukan pemeriksaan khusus dan meminta pertanggungjawaban dengan mengembalikan uang debitur tersebut dan menyetorkan ke rekening nasabah.
   2) Pemberhentian pegawai dengan tidak memperpanjang perjanjian kontrak sebagai pegawai PD. BPR Sarimadu.

b. Pada Kantor Cabang Pekanbaru
   1) Memberikan sanksi penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun dan melakukan mutasi ke Kantor Pusat Bangkinang terhadap pegawai funding kantor cabang Pekanbaru yang melakukan penyimpangan interen tersebut.
   2) Memberikan teguran tertulis I untuk petugas teller kantor cabang Pekanbaru karena telah memproses transaksi penarikan tunai nasabah yang dilakukan oleh pegawai funding tanpa disertai dengan surat kuasa penarikan tabungan dari nasabah.
      Sebagai pegawai bank, yang bersangkutan harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan patuh pada aturan yang berlaku.

c. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.

11. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2018 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Lanjutan Permasalahan Hukum s.d Periode Tahun 2018:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
) Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	18	
) Dalam proses penyelesaian	22	
T o t a l	40	

Uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Total perkara hukum yang selesai secara litigasi baik *inkracht* tingkat pengadilan pertama yang ditangani oleh bank sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 18 (delapan belas) perkara Perdata yang masih dalam proses eksekusi dan penyelesaian.
2. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 40 (empat puluh) Perkara Perdata yang sebagian besarnya merupakan perkara *Non Performing Loan (NPL)*,.

12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

a. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi

terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank.

b. Secara filosofis, program-program fungsi sosial bank lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
   1) Pelaksanaan Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan perbankan pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah operasional PD. BPR Sarimadu, yang bertujuan untuk melatih pelajar mulai pada usia dini agar mengerti tentang Edukasi Literasi Keuangan Perbankan.
   2) Bank ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor bank.

13. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

a. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment)* pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2.11	0.47	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip

					GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.88	0.31	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka Bank tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3.50	0.39	Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang didokumentasikan serta pengungkapan dalam risalah rapat. selama tahun 2018 dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.

5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.03	0.23	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.20	0.24	Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. SKAI belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan pedoman untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.00	0.06	Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada bank dan kepada OJK.
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0.00	0.00	Bank telah memulai menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern , walaupun belum terdapat SOP mengenai menajemen risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.00	0.17	Bank Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2.10	0.18	Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan telah sesuai dengan

					ketentuan bank.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2.00	0.17	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan, bank menyusun laporan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dari akuntan publik sesuai ketentuan OJK.
	Nilai Komposit	**100%**		**2.21**	**Peringkat Komposit (Baik)**

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PD. BPR Sarimadu belum sepenuhnya melakukan penerapan *Good Corporate Governance*, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen PD. BPR Sarimadu akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
2. Membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
3. Melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan audit intern.
4. Dewan Pengawas meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

5. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
6. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)* atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2018.

Demikian Laporan pelaksaaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD. BPR Sarimadu dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD. BPR Sarimadu.

Ditetapkan di : Bangkinang,
Pada Tanggal : 26 April 2019

PD. BPR SARIMADU
DIREKSI,

dto

YORDAN, S.E., Ak., CA.
Direktur Operasional

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN PENGAWAS,

dto

DR. Ir. H. ARMAN, M.M.
Ketua